



KAWASAN MALIOBORO PUSAT EKONOMI RAKYAT HARMONIS Relokasi PKL, Kerja Sama dengan UNESCO

YOGYA (KR) - Pemda DIY terus mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung terkait dengan rencana relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Malioboro. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta para PKL yang akan direlokasi untuk memahami rencana tersebut. Mengingat relokasi PKL itu telah lama direncanakan.

Di mana salah satu tujuannya adalah ingin mewujudkan rencana kerja sama dengan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) berkaitan dengan sumbu filosofi. Yaitu mendukung pengusulan sumbu filosofi sebagai warisan budaya dunia versi UNESCO.

"Kita ingin membangun kerja sama dengan UNESCO untuk sumbu filosofisnya. Jadi PKL akan kami beri ruang, kami tata dan kami kan juga harus membangun eks bioskop Indra untuk tahap kedua di sebelah utara," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kamis (2/12).

Sultan mengatakan, lokasi baru untuk para pedagang (PKL) ada di kawasan Malioboro akan representatif. Bahkan dengan dilakukan relokasi PKL Malioboro justru mendapatkan ruang yang sudah ditata oleh Pemda DIY. Rencananya relokasi

PKL tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai Januari 2022. Nantinya, pedagang akan dipindah ke eks Bioskop Indra dan eks gedung Dinas Pariwisata DIY. Meski begitu dirinya memastikan bahwa PKL yang direlokasi ditempatkan di dalam kawasan Malioboro.

Sementara itu saat dimintai soal adanya penolakan dari PKL terkait dengan relokasi tersebut. Sultan meminta masyarakat memahami bahwa selama ini selasar yang digunakan PKL berjualan merupakan milik pemilik toko sehingga upaya penataan perlu dilakukan.

"Saya kira mereka juga harus tahu sebenarnya tempat jualan PKL itu milik pemilik toko bukan milik Pemda. Karena Pemda kan trotoarnya sudah untuk jalur lambat," ujarnya.

Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro Sujarwo Putra mengungkapkan kawasan Malioboro adalah pusat ekonomi rakyat yang harmonis

dimana hidup berdampingan dan saling melengkapi antara ekonomi rakyat, baik PKL, andong, becak, dan lainnya dengan pengusaha dan pemodal besar. Hal ini justru merupakan wujud sebenarnya kawasan Malioboro merupakan ciri khas dan keistimewaan pembangunan di DIY. Pembangunan yang manusiawi dan memberi peluang secara sejajar bagi ekonomi rakyat untuk berpartisipasi dan menikmati buah manisnya di dalam suatu kawasan legendaris yang menjadi bagian dari sumbu filosofi.

"Jika PKL di kawasan Malioboro direlokasi guna mendukung sumbu filosofi yang tengah diajukan sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO atau ingin menjadi kawasan pedestrian seperti di Singapura maka kenyataan tersebut jauh dari mengherankan. Sebab, pembangunan di Yogyakarta dibangun dalam spirit tahta untuk rakyat dimana kekuasaan yang diabdikan sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat dan teristimewa rakyat kecil yang tidak lain adalah PKL," paparnya.

Sujarwo menyebut wajah Malioboro yang demikian telah menjadi daya tarik wisatawan nasional maupun mancanegara. **(Ria/Ira)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005